

TESIS

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
MENYELENGGARAKAN KAWASAN TANPA ROKOK**



EKO PERRYAWAN ARIPIIN

NIM : 12124014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2026

TESIS

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
MENYELENGGARAKAN KAWASAN TANPA ROKOK**

**Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Narotama
Surabaya**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2026

TESIS

PADA TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua :

Dr. NYNDA FATMAWATI O, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota :

Dr. MOH. SALEH S.H., M.H.

Anggota :

Dr. SUWARDI S.H., M.Hum.



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah Direvisi
Pada Tanggal

Dosen Pembimbing


Dr. MOH SALEH, S.H., M.H.

PRO PATRIA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama




Dr. MOH FAKHUL HUDA, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

Oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. MOH SALEH, S.H., M.H.
PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama
H. TAKHUL NUDA, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/ Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,.....
Yang membuat pernyataan,



EKO PERRYAWAN ARIPIN
NIM: 12124014

ABSTRAK

Penelitian ini mempermasalahkan mengenai batasan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik dalam implmentasi maupun penegakan hukumnya, karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak jelas mengatur mengenai batasan kewenangan tersebut, khususnya batasan kewenangan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Permasalahan hukum sebagai isu hukum dalam penelitian ini adalah batasan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta sinergi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber analisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok menetapkan kriteria penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kawasan Tanpa Rokok yang dimiliki, dikelola, dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan badan usaha swasta yang Perizinan Berusahaanya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk sinergi yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah dilakukan terhadap penyusunan kebijakan Daerah terkait dengan KTR, pencegahan dan pengendalian dalam KTR, pembinaan dan pengawasan, dan penegakan terhadap pelanggaran KTR. Untuk mengatasi permasalahan ini, disarankan agar dilakukan penyelarasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Kawasan Tanpa Rokok serta membuat rencana aksi bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Kewenangan, sinergi

ABSTRACT

This research examines the limitations of the East Java Provincial Government's authority in implementing Smoke-Free Zones, both in terms of implementation and law enforcement. The provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health do not clearly regulate the limitations of this authority, particularly regarding the authority of Regency/City Governments.

The legal issues addressed in this research are the limitations of the East Java Provincial Government's authority and the synergy between the East Java Provincial Government and Regency/City Governments in implementing Smoke-Free Zones. To address these legal issues, a normative legal research method was used, using primary and secondary legal materials as analytical sources.

The research findings indicate that East Java Provincial Regulation Number 4 of 2024 concerning Smoke-Free Zones establishes criteria for establishing Smoke-Free Zones under the authority of the East Java Provincial Government. These include Smoke-Free Zones owned, managed, and/or operated by the East Java Provincial Government, Regionally-Owned Enterprises of the East Java Provincial Government, and private business entities whose Business Licenses are issued by the East Java Provincial Government. Synergy between the East Java Provincial Government and the Regency/City Governments in East Java can be achieved through the development of regional policies related to smoke-free areas (KTR), prevention and control of KTR, guidance and supervision, and enforcement of KTR violations. To address this issue, it is recommended to align the East Java Provincial and Regency/City Regulations regarding Smoke-Free Areas and develop a joint action plan between the East Java Provincial Government and the Regency/City Governments in East Java.

Keywords: Smoke-Free Areas, Authority, Synergy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan tesis dengan judul “KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENYELENGGARAKAN KAWASAN TANPA ROKOK” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi tersusunnya Tesis ini hingga layak untuk disajikan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Ass. Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Tim Penguji Tesis Universitas Narotama Surabaya, Bapak Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H., Bapak Dr. Nynda Fatmawati O, S.H., M.H., MKn., dan Bapak Dr. Suwardi, S.H., M.Hum.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.
6. Istriku tercinta dan anak-anakku yang selalu memberikan cinta dan dukungannya, terimakasih atas kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materil kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Apresiasi pula kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya atas kebersamaan dan kekompakannya, sehingga semangat belajar yang tinggi dapat selalu kita jaga.

Semoga segala amal kebaikan dan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharap dari tesis ini semoga bisa memberikan kontribusi perkembangan ilmu hukum dan semoga bermanfaat bagi semuanya.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	v
Surat Pernyataan.....	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Tinjauan Pustaka	6
1.5.1. Prinsip Otonomi Daerah.....	6
1.5.2. Teori Kewenangan.....	10
1.5.3. Konsep Kawasan Tanpa Rokok	17
1.6. Originalitas Penelitian.....	22
1.7. Metode Penelitian.....	23
1.7.1. Tipe Penelitian	23
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	24
1.7.3. Bahan Hukum.....	24
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	25
1.8. Sistematika Penulisan	26

BAB II BATASAN KEWENANGAN PEMERINTAAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK.....	28
2.1. Prinsip Pembagian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan	28
2.2. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tan Rokok.....	39
2.3. Perangkat Daerah Provinsi yang Berwenang Menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok.....	46
BAB III BENTUK SINERGI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK	57
3.1. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur	57
3.2. Bentuk Sinergi Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tan Rokok	64
BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73